BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang digalakkan oleh bangsa Indonesia dewasa ini telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II. Berbagai kemajuan yang telah dicapai pada PJPT I merupakan prestasi tersendiri yang menjadi tantangan agar dalam PJPT selanjutnya dapat dicapai kemajuan yang lebih tinggi.

Dalam PJPT I, bangsa Indonesia banyak sekali ketinggalan dari bangsa-bangsa lain, tetapi menyerap modal dan investasi yang sangat besar. Salah satu sumber permodalan yang diandalkan ialah kredit dari bank-bank pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, karena adanya fluktuasi perekonomian nasional maupun internasional, banyak di antara kredit-kredit tersebut yang macet dan tidak dapat dikembalikan oleh debitur.

Di sisi lain, adalah kenyataan bahwa pembangunan harus tetap dilaksanakan dan tentu saja ini membutuhkan modal yang besar. Karena itu, sebagai usaha mengembalikan kekayaan negara macet tersebut, dibentuklah Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) dengan tugas pokok mengurus piutang negara, salah satunya adalah kredit-kredit macet dari bank pemerintah.

Untuk mengoperasionalkan tindakan pengurusan ini berdasarkan Keputusan Presiden No.21 tahun 1991, PUPN dibantu oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) untuk melayani kepentingan pengurusan piutang negara secara langsung, maka dibentuklah kantor operasional di daerah-daerah yaitu Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N). Sehingga untuk

menetapkan suatu produk hukkum, dapat dikatakan perumusannya dilakukan oleh KP3N ini.

Penyajian informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat menunjang pengurusan piutang negara dalam hal pelayanan langsung kepada masyarakat (debitur). Jika Informasi yang disajikan dapat mengakomodasi keinginan para debitur, diharapkan dalam pelayanan kepada debitur tidak akan menimbulkan ketidakpuasan para debitur tersebut.

Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara adalah kebutuhan informasi untuk semua tingkat manajemen di BUPLN/KP3N atau sistem komputerisasi yang digunakan dalam kantor ini, untuk mendukung kelancaran dalam pengurusan piutang negara macet.

Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK/1993 tanggal 27 Februari 1993 tersebut telah menetapkan besarnya piutang negara perbankan, yaitu terdiri dari hutang pokok, ditambah bunga, denda dan beban lainnya dengan catatan pembebanan bunga dan denda tersebut maksimal sampai 21 bulan sejak kredit dinyatakan diragukan.

Berdasarkan pengamatan selama praktek kerja lapangan di KP3N Bandung, penetapan nilai piutang negara perbankan ini belum dapat dilakukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan tersebut, mengingat berbagai hambatan kendala yang ada. Akibat belum terpenuhinya ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan besarnya piutang negara perbankan dalam Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara belum dapat diselesaikan dengan maksimal, oleh karena itu perlu dicari alternatif lain yang dapat menunjang dan memperlancar proses administrasi di KP3N Bandung .

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat judul :

PERANAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (SAIPPN) DALAM KEGIATAN ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA BANDUNG.

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah di dalam memperoleh materi daripada data yang diteliti dan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di perusahaan yaitu :

1. Bagaimana peranan Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara.
2. Hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan Sistem Administrasi dan Informasi
   Pengurusan Piutang Negara.
3. Usaha-usaha apa untuk mengatasi hambatan-hambatan.

1.3. Tujuan Penulis Makalah

Adapun tujuan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Diploma Satu (D1) Jurusan Akuntansi Perpajakan tahun 1999/2000 pada Universitas Komputer Bandung.
2. Untuk mengetahui peranan SAIPPN dalam kegiatan Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SAIPPN.
4. Mengetahui usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan.
5. Menambah pengalaman wawasan dalam menghadapi situasi lingkungan kerja.

1.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan makalah ini, penulis menggunakan metode deskriptif murni, karena penulis dalam mengadakan penelitian hanya mengambil satu obyek tertentu. Dengan demikian hasil penelitian tersebut tidak bisa ditarik secara generalisasi, dengan kata lain jika hasil penelitian ingin ditetapkan di Perusahaan lain harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari metode deskriptif itu sendiri ialah suatu metode yang hanya menceritakan suatu keadaan nyata dan kondisi yang sebenarnya.

Dalam penulisan makalah ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Wawancara

   Penulis melakukan teknik pengumpulan data/permasalahan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan staf pegawai di seksi Non Perbankan.

2. Observasi

   Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3. Studi Literatur

   Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari sumber-sumber dari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan makalah ini.

4. Studi Pustaka

   Yaitu data dan teori penulis dapatkan dan berbagai laporan pengurusan piutang negara dan peraturan perundang-undangan tersebut surat edaran, surat keputusan yang berhubungan dengan makalah ini.